

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang berisi kondisi kinerja perusahaan, dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang berguna bagi pihak eksternal dan pihak internal maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 / POJK.04 / 2018, setiap perusahaan diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK). Laporan keuangan sering kali disalahgunakan oleh manajemen dengan melakukan perubahan dalam pemilihan metode akuntansi yang digunakan sehingga mempengaruhi laba yang akan diperlihatkan pada laporan keuangan. Hal ini dikenal dengan istilah manajemen laba. Laba juga berfungsi untuk menilai kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan laba dan untuk menaksir resiko investasi (Kirschenheiter dan Melumad, 2014 dalam Afifa dan Daljono, 2013).

Menurut Scott (2005) dalam Happy (2013), menyatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan pemilihan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan akan memaksimalkan utilitas manajer dan nilai pasar perusahaan. Manajemen laba didasarkan dengan adanya teori agensi dimana teori agensi ini menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk melakukan tindakan memaksimalkan kepuasan atau kepentingan mereka sendiri. Menurut teori tersebut setiap

individu pasti memiliki sifat untuk mementingkan diri mereka sendiri dan mengabaikan orang lain.

Mekanisme *Corporate Governance* diproksikan dengan keberadaan dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit. Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* dalam Eva dan Khoirudin (2016), *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dalam Tegar dan Andri (2014) konsep *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Dengan diterapkannya *Corporate Governance* dengan baik dan benar maka konflik keagenan yang terjadi di perusahaan dapat dikurangi, sehingga pada akhirnya nilai dari perusahaan yang sesungguhnya dapat diketahui.

Dewan direksi yaitu dewan yang bertugas untuk mengurus perusahaan. Menurut Merdistusi, dkk (2003) dalam Yunel (2018), dewan direksi memiliki peran penting dalam perusahaan yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir tindakan manajemen laba dimana dewan komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Menurut Panca (2009) Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung

jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam memberikan pengawasan terhadap laporan keuangan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajer dan dapat mengurangi tindakan manajemen laba di perusahaan. Menurut Rahmawati, dkk (2007) dalam Yunel (2018), dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus perusahaan Indofarma, Pertamina, dan Kereta Api Indonesia (KAI). Kasus PT Indofarma Bapepam memutuskan memberi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500 juta kepada direksi PT Indofarma Tbk yang menjabat pada periode terbitnya laporan keuangan tahun 2001 karena diduga terjadinya ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan. Selain itu kepada Direksi PT Indofarma juga diperintahkan 3 hal. Pertama, segera membenahi dan menyusun sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai untuk menghindari timbulnya permasalahan yang sama di kemudian hari. Kedua, menyampaikan laporan perkembangan atas pembenahan dan penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perseroan secara berkala setiap akhir bulan kepada Bapepam. Ketiga, menunjukkan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan audit khusus untuk melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal dan sistem

akuntansi bula perseroan telah selesai melakukan pembenahan dan penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan (Viny, 2016).

DPR menilai Dewan Komisaris PT [Pertamina](#) (Persero) menjadi pihak yang bertanggung jawab atas dualisme kepemimpinan, antara direktur utama dan wakil direktur utama di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut DPR Dewan komisaris seharusnya mampu meredam konflik yang terjadi di tubuh pertamina. Sehingga tidak terjadi kecurangan di laporan keuangan, kemudian memastikan bahwa manajemen perusahaan dapat berjalan secara optimal (Ariyanti, 2017).

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI 2005, perusahaan BUMN ini dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti lebih rinci, perusahaan justru rugi sebesar Rp 63 miliar (Meula, 2017).

Dalam kasus ini, ditunjukkan bagaimana peran dari tiap organ pengawas di dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik.

Akuntan public yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (Meula, 2017).

Keberadaan dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit diharapkan dapat mengurangi praktek manajemen laba. Nurhayati, Arik dan Norita (2012) dan Clarissa Taco, Ventje (2016) mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba dan peneliti Oktaviani (2013), Hengky (2017), dan Yunel (2018) berpendapat lain bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Firmansyahrez, Dudi dan Siska (2016) berpendapat bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, Yunel (2018) berpendapat dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba lalu peneliti Clarissa dan Ventje (2016), Panca (2009) dan Hastuti (2017) berpendapat dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan. Peneliti Tegar dan Andri (2014) berpendapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Peneliti Afifa dan Daljono (2013) berpendapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Firmansyahrez, Dudi dan Siska (2016) dan Clarissa, Ventje (2016) berpendapat komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan peneliti Yunel (2018) berpendapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Kasus manajemen laba ini pasti akan memiliki dampak yang buruk bagi pemegang saham (*stakeholder*), kegiatan manajemen laba masih menuai pro dan kontra dikalangan dunia usaha. Banyak peneliti-peneliti terdahulu telah meneliti manajemen laba namun hasil yang didapatkan berbeda-beda. Oleh

sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali untuk membuktikan apa sajakah yang mempengaruhi tindakan manajemen laba di suatu perusahaan. Pada penelitian saat ini peneliti mengajukan perbedaan, perbedaan dalam pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti sekarang yaitu perusahaan BUMN sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sample manufaktur, farmasi, dan perbankan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dijabarkan dengan pertanyaan:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang peneliti diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap manajemen laba.
2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.
3. Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain yaitu:

1. Memberikan kontribusi terhadap ilmu akuntansi, terutama bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba.
2. Sebagai bahan referensi oleh pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi terjadinya manajemen laba pada sebuah perusahaan.
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara jelas dan menyeluruh mengenai penulisan ini maka penulisan disusun sebagai berikut :

Bab 1, bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian, serta disusun sistematika penulisan diakhir bab ini.

Bab 2, bab ini meliputi tentang landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dari perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari peneliti kemudian disebutkan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini.

Bab 3, bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Bab ini terdiri atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasionalnya. Kemudian dijelaskan mengenai pengambilan sample, jenis dan sumber data yang digunakan, serta

metode pengambilan data dan diakhiri dengan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab 4, bab ini membahas deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan yang mendukung dalam rangka pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

Bab 5, bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan keterbatasan-keterbatasan dari penelitian ini.